

# MODEL PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURAKARTA (Upaya Mendukung Program Aksi Kota Kreatif)

**Joko Suwandi, Budi Sutrisno**

Dosen Pendidikan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: js171@ums.ac.id

## ABSTRACT

**T**he research aimed to describe the model of PKL coaching held by Surakarta City Government in the shape of arranging coaching (empowerment) model with several programmed and sustainable approaches, so that it could assure people economic activity settlement and support city development program, including Creative City Action Program. This study explored and described PKL coaching clinic held by Surakarta City Government, and the result would be a material for appropriate coaching model development. The data collection methods were documentation and in-depth interview with key source person, after that the data to be analyzed with SWOT and critical analysis. The results revealed: 1) coaching and counseling in the shape of PKL is currently not effective; 2) the program cannot fully assist to get capital loan. 3) The City Government provides shelter, chart, tent, and umbrella as free facilities; 4) The SIP will be issued soon; 5) administer events that involving PKL such as night selling centre GALABO, Night market in Ngarsopuro, Car Free Day in Slamet Riyadi and Pucangsawit street, Sunday Market in Manahan Stadium.

**Keywords:** *Creative Economy, Empowerment, Coaching, Cadger (PKL)*

## PENDAHULUAN

Kota Surakarta telah menetapkan tahun 2015 sebagai tahun awal pengembangan ekonomi kreatif, dengan dilabeli 'Program Aksi Kota Kreatif'. Tujuan utama program adalah meningkatkan kehidupan sosial, iklim bisnis, peningkatan ekonomi, dan pembangunan citra kawasan. Kota Surakarta yang terkenal dengan sebutan 'KOTA SOLO' memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif, hal ini terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia yang handal, daya kreativitas masyarakat yang tinggi, dukungan pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dan juga tersedianya jaringan pemasaran yang memadai. Strategi pengembangan

ekonomi kreatif di Kota Surakarta juga memanfaatkan *landmark* kota yang telah dikenal di seluruh nusantara bahkan luar negeri, yaitu sebagai kota batik, kota budaya, kota wisata, kota kuliner, kota olahraga dan kota ramah PKL.

Beberapa kriteria dari konsep ekonomi kreatif menurut *The United Nations Conference on Trade and Development/UNCTAD* (2010) meliputi; 1) Ekonomi kreatif sebagai sumber penghasilan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mempromosikan keterbukaan sosial dan pembangunan kebudayaan dan manusia di suatu kota; 2) Ekonomi kreatif mampu menumbuhkan jalinan interaksi antara aspek ekonomi-sosial-budaya dengan teknologi dan kekayaan intelektual; 3) Ekonomi kreatif

merupakan penerapan aktivitas ekonomi yang didasari oleh ilmu pengetahuan (*knowledge-based economy*); 4) Ekonomi kreatif menjadi tempat berkembangnya inovasi dan aktivitas pengambilan keputusan yang bersifat multidimensional; dan 5) Jantung dari ekonomi kreatif adalah industri kreatif (*creative industries*).

Apakah usaha PKL dapat dikembangkan sebagai usaha ekonomi kreatif? Dari fakta sejarah bahwa usaha PKL memiliki potensi untuk dijadikan sebagai usaha yang dapat mendukung Program Ekonomi Kreatif, terutama bidang kuliner dan pemasaran barang-barang klithikan dan antik. Tidak dipungkiri, bahwa beberapa usaha kuliner unggulan yang menjadi '*ikon kuliner*' Kota Solo merupakan usaha PKL, antara lain; Tengkleng Bu Edy Pasar Klewer, Gudeg Ceker Bu Kasno Margoyudan, Mie Toprak Yu Nani Kartopuran, Sate kere Yu Rebi Sriwedari, Susu si Jack, Gempol Pleret yu Yami dan pusat jajan Galabo (Gladag Langen Bogan), Markobar, Bestik Harjo, Wedangan Mbah Wir, Es Kobar dan sebagainya. Memang beberapa dari mereka setelah berkembang besar berpindah ketempat usaha yang lebih luas dan permanen, tetapi cikal bakal mereka dari usaha PKL.

Hasil penelitian Sutrisno dan Suwandi (2006) menunjukkan bahwa usaha PKL dapat memenuhi kriteria dari konsep ekonomi kreatif itu, yaitu menjadi sumber penghidupan pelaku dan katup pengaman sosial dan penyumbang PAD kota. Oleh sebab itu usaha PKL memiliki potensi besar menjadi kekuatan ekonomi masyarakat kota asal dibina secara kelanjutan (Sutrisno dan Suwandi, 2014). Selanjutnya dijelaskan bahwa selain menata, Pemkot Surakarta harus membina dan memberdayakan secara terprogram dan berkelanjutan, agar PKL menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri, dapat mendukung pembangunan kota dan

tidak lagi menjadi parasit kota. Apalagi usaha ini saat tidak lagi menjadi usaha rakyat kecil untuk bertahan hidup saja (*subsisten*) tetapi telah menjadi usaha 'orang bermodal' untuk meningkatkan kesejahteraan/*welfare* (Suwandi dan Muhibbin, 2012).

Secara normatif, keberhasilan pengelolaan PKL tidak hanya akan berhenti pada keberhasilan menata atau merelokasi PKL ke tempat-tempat yang ditentukan Pemkot, tetapi harus dilanjutkan sampai pada tingkat pemberdayaan melalui pembinaan yang berkelanjutan, sehingga kejadian usaha PKL mati setelah direlokasi bisa diminimisir. Dapat dianalogkan seperti seseorang memindah tanaman dari satu tempat ketempat lain. Apabila dipindah dan tidak dibantu merawat niscaya kemungkinan mati dan tidak tumbuh sangat besar, tetapi berbeda kalau setelah dipindah dilakukan perawatan secara seksama, seperti; dibantu penyiraman, dipupuk, dijaga dari hama dan sebagainya, niscaya tanaman itu akan tumbuh subur dan menghasilkan.

Pembinaan dan pemberdayaan menjadi kata kunci bagi pengembangan PKL. Ramadhan (2015) menyatakan bahwa pembinaan yang diberikan oleh penguasa daerah terbukti sangat membantu dalam cara atau langkah dalam pengembangan usaha PKL. Hal ini diperkuat oleh Indriyanti (2014), yang mengatakan bahwa pembinaan yang tepat akan mampu memandirikan PKL dan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat serta dapat menciptakan ketertiban umum.

Pembinaan berarti usaha, tindakan dan kegiatan yang digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik (Badudu, 2008:316). Secara konseptual, pembinaan sering juga disebut dengan istilah pemberdayaan (*empowerment*), yang secara harfiah mengandung arti memberikan atau mendapatkan kekuatan

(*power*). Hal ini sesuai dengan pendapat Friedmann (1992), bahwa pembinaan kepada kelompok atau secara kolektif (seperti PKL), selalu terkait dengan memberikan kemampuan kepada mereka yang biasanya tidak berdaya, untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber daya yang menjadi dasar dari kekuasaan dalam suatu usahanya.

Bentuk pembinaan mencakup kegiatan pemberian pengarahan dan bimbingan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kecakapan dibidang usaha, ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan lainnya. Hasil penelitian Qasanova dan Khairani (2013) menunjukkan bahwa pembinaan PKL harus menekankan pada pendekatan praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan. Pembinaan dilakukan secara bertahap untuk mencapai status kemandirian, yaitu melalui tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli, tahap transformasi kemampuan berupa perluasan wawasan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan dasar untuk bisa berperan dalam pembangunan; dan terakhir tahap peningkatan kemampuan intelektual menuju terbentuknya inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kepada kemandirian.

Strategi dan prinsip Pembinaan menurut Rapp, C. A., Saleebey, D. dan Sullivan, W. P. (2005) meliputi; 1) pembinaan sebagai sebuah proses kolaboratif, 2) dalam proses pembinaan menempatkan yang terbina sebagai aktor subjek yang berkompeten, 3) kompetensi subjek pembinaan diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, 4) solusi harus yang berasal dari situasi khusus, 5) jaringan-jaringan informasi sosial sebagai sumber dukungan, 6) masyarakat harus berpartisipasi dalam pembinaan, dan 7) proses pembinaan harus bersifat dinamis, sinergis dan evolutif.

Keberhasilan pembinaan harus dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Schuler, Hasmaeni dan Riley (dalam Mimin Rochayati. 2014) mengembangkan indikator indeks pembinaan (*empowerment Index*), yang mencakup keberhasilan dalam bentuk; 1) keberdayaan dalam ekonomi, 2) kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan 3) kemampuan kultural politis. Ketiga indikator tersebut akan dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu kekuatan di dalam (*power with in*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuatan atas (*power over*), dan kekuatan dengan (*power within*).

Ada dua kecenderungan proses pembinaan PKL di suatu kota, yaitu kecenderungan primer dan sekunder (Sedarmayanti. 2009:79). Kecenderungan primer, yaitu menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar menjadi usaha yang lebih berdaya, sebagian dengan membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Sementara kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar PKL mampu menentukan apa yang menjadi pilihan usahanya melalui proses dialog. Sedangkan pendekatannya menggunakan tiga bentuk, yaitu pendekatan sosial budaya, pendekatan ekonomi dan pendekatan normatif. Pendekatan budaya menyangkut bentuk pembinaan yang lebih mengedepankan sikap toleransi tinggi dengan istilah '*nguwongke uwong*', sedangkan pendekatan ekonomi menekankan kepada segala upaya yang berhubungan dengan pengembangan usaha, dan pendekatan normatif menyangkut perihal kepatuhan terhadap peraturan-peraturan daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif jenis deskriptif analitik (Sukmadinata, 2012:67), yaitu mengeksplorasi dan mendeskripsikan pola kegiatan pembinaan yang dilakukan Pemkot Surakarta dalam melaksanakan program pengelolaan PKL. Terutama mewujudkan PKL yang mandiri, memiliki daya tarik, berdaya saing usaha, bersih, tertib hukum dan mampu berinteraksi sosial dengan masyarakat, serta penyumbang PAD kota.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada para informan kunci (kalangan PKL), pejabat dan pimpinan organisasi yang memiliki kaitan dengan program pengelolaan PKL di Kota Surakarta. Validitas data dijaga dengan melakukan pemeriksaan triangulasi sumber, metode, penyelidik dan teori, sedangkan analisis data menggunakan analisis SWOT, untuk menganalisis situasi dan juga kondisi yang bersifat deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

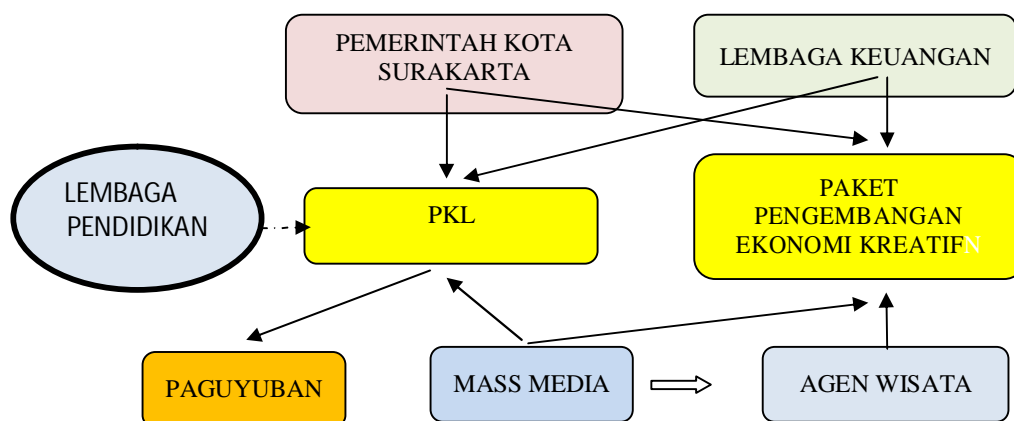
Visi dan misi pengembangan ekonomi kreatif Kota Surakarta diselaraskan dengan visi dan misi pembangunan Kota Surakarta seperti tertuang dalam Perda Kota Surakarta nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025. Visi Kota Surakarta dalam 2 dasawarsa, tahun 2005– 2025 adalah: “SURAKARTA KOTA BUDAYA, MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA”, sedangkan visi pengembangan ekonomi kreatif adalah “TERWUJUDNYA KOTA SURAKARTA SEBAGAI KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA DAN EKOLOGI”.

Misi ekonomi kreatif Kota Surakarta menekankan pada upaya pengembangan bidang produksi, promosi, akses

ekonomi kreatif dan partisipasi seluruh *stakeholder*, antara lain, 1) meningkatkan daya saing industri kreatif Kota Surakarta, 2) meningkatkan nilai tambah bahan baku lokal yang berorientasi pada penghematan sumberdaya alam dan ramah lingkungan, 3) meningkatkan kontribusi industri kreatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surakarta, 4) mengembangkan inovasi yang berlandaskan kearifan dan warisan budaya local, 5) menumbuhkembangkan kawasan-kawasan kreatif di wilayah Kota Surakarta, dan 6) menguatkan citra kreatif pada produk/jasa sebagai upaya pencitraan kota.

Pengembangan ekonomi kreatif di Kota Surakarta bertujuan untuk; 1) meningkatkan daya saing ekonomi kreatif Kota Surakarta; 2) peningkatan apresiasi terhadap pelaku dan karya kreatif yang menggunakan bahan baku lokal dengan orientasi pada penghematan sumberdaya alam dan ramah lingkungan; 3) peningkatan kontribusi ekonomi industri kreatif terhadap PDRB Kota Surakarta; 4) penciptaan inovasi di sektor ekonomi kreatif; 5) pengembangan zona –zona ekonomi kreatif Kota Surakarta; dan 6) peningkatan citra kreatif produk/jasa dari Kota Surakarta di mata dunia internasional.

Model Pengembangan program ekonomi kreatif di Kota Surakarta melibatkan berbagai pihak, antara lain; Pemkot (khususnya dinas yang berhubungan dengan dunia industri dan perdagangan), Lembaga Keuangan, Lembaga Pendidikan Ketrampilan, Mass Media, dan Agen Wisata. Secara skematik pengembangan ekonomi kreatif digambarkan dalam Blue Print Pengembangan Ekonomi Kreatif (2014):



Gambar 1 Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Surakarta

Penilaian Pemkot terhadap keberadaan PKL sangat positif, PKL dinilai sebagai bagian dari sektor kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, untuk itu perlu dilindungi, dibina dan dikembangkan lebih efisien agar kehidupan para PKL semakin sejahtera dan secara optimal dapat memberikan hasil guna dan daya guna bagi perwujudan tujuan pembangunan daerah Kota Surakarta.

Mengingat pertumbuhan PKL sedikit banyak dipengaruhi oleh pertumbuhan pusat-pusat keramaian serta penggunaan tempat-tempat umum antara lain tepi-tepi jalan umum, trotoar, lapangan olahraga digunakan sebagai tempat usaha PKL, maka keberadaan PKL perlu untuk ditata, dibina, dan ditertibkan. Bahwa usaha pembinaan, penataan dan penertiban PKL tidak bertujuan untuk memarjinalkan peran dan kehidupan PKL, namun ditujukan untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidupnya dengan memberikan kepastian tempat dan usaha.

Namun disisi lain karena PKL menggunakan tempat-tempat umum yang mempunyai yang telah mempunyai fungsi tersendiri sebagaimana diatur dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), maka perlu diadakan

pengaturan dalam hal pemanfaatan tempat umum tersebut, sehingga tetap terjaga ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan, dan keamanan serta tetap dapat berfungsi sesuai dengan fungsi aslinya.

Melalui kegiatan penataan yang meliputi perlindungan, pembinaan dan pengembangan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan PKL sehingga memiliki kemampuan untuk meningkatkan usahanya, memiliki daya tarik dan daya saing usaha serta tidak menjadi salah satu sumber timbulnya permasalahan perkotaan, termasuk ketertiban masyarakat.

Visi Pengelolaan PKL adalah 'terciptanya kemitraan PKL dengan Pemkot dalam pembangunan Kota Surakarta', sedangkan Misi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan PKL yang mandiri, memiliki daya tarik, berdaya saing usaha, bersih, tertib hukum serta mampu berinteraksi sosial dengan masyarakat.
- b. Mewujudkan PKL yang tertata sesuai dengan jenis dagangan dan infrastruktur pendukungnya sebagai salah satu daya tarik wisata.
- c. Mewujudkan kawasan dan lokasi PKL yang sesuai dengan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku.

Tujuan penetapan visi dan misi adalah sebagai arah penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL, antara lain adalah ;

- a. Mewujudkan PKL yang tertib dan tertata sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Mewujudkan PKL yang tertata dengan dasaran *knock down*.
- c. Mewujudkan PKL yang memahami dan melaksanakan peraturan yang berlaku.
- d. Mewujudkan perubahan perilaku PKL yang paham dan peduli lingkungannya.

Bagaimana usaha PKL mendukung program pengembangan ekonomi kreatif ? Usaha PKL sebagai usaha perdagangan sedikit banyak memerlukan sentuhan kreativitas tinggi agar dapat memiliki daya tarik sebagai destinasi kuliner dan daya tarik kunjungan wisatawan. Untuk itu pemberdayaan merupakan harga mati yang harus sinkron dengan program-program pembangunan kota. Khususnya mendukung program kota kreatif dibidang perekonomian dan pariwisata. Pembinaan atau pemberdayaan di atur dalam Bab V Pasal 12 Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan PKL, di dalam tersebut disebutkan bahwa; 1) Untuk pengembangan usaha PKL, Walikota atau Pemkot berkewajiban memberikan pemberdayaan berupa: a) bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha; b) pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain; c) bimbingan untuk memperoleh peningkatan permodalan; dan d) peningkatan sarana dan prasarana PKL; 2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan pertimbangan dari Instansi terkait dan aspirasi masyarakat sekitar lokasi usaha PKL; 3) Untuk melaksanakan kewajiban tersebut ayat (1) Walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga

dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL.

Pembinaan PKL di Kota Surakarta dibawah koordinasi Dinas Pengelolaan Pasar, cq. Bidang Pengelolaan PKL bersama Dinas Perdagangan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Tata Kota, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata dan Satpol PP. Secara terintegrasi dilaksanakan secara bersama-sama dalam bentuk pembimbingan, penyuluhan, fasilitasi keperluan pengembangan usaha dan penertiban.

Adapun secara lebih rinci, pelaksanaan kegiatan-kegiatan mencakup hal-hal sebagai berikut;

- a. Bimbingan teknis untuk meningkatkan keterampilan usaha PKL, mencakup;
  - Bimbingan teknis berdagang melibatkan bagian Pemberdayaan PKL dibantu Dinas Perdagangan;
  - Bimbingan teknis akses perolehan sumber-sumber bahan baku melibatkan akademisi perguruan tinggi;
  - Bimbingan teknis akses sumber-sumber modal dan pemanfaatan permodalan melibatkan dunia perbankan; dan
  - Pendampingan bagi para pedagang menggunakan paguyuban dan akademisi.
- b. Penyuluhan teknis untuk meningkatkan keterampilan usaha, meliputi;
  - Penyuluhan teknis berdagang yang benar melibatkan Dinas Perdagangan dan praktisi pelaku usaha yang sukses;
  - Penyuluhan teknis akses sumber-sumber bahan baku yang mudah dan murah dengan melibatkan Super Market Luwes Grup; dan
  - Penyuluhan teknis akses dan pemanfaatan permodalan yang berdaya guna dan berhasilguna

melibatkan Bank Indonesia, Bank Jateng dan Bank Solo.

c. Mendorong pemberdayaan PKL.

- Membantu pendirian koperasi di setiap sentra PKL, antara lain bekerjasama dengan Dinas Koperasi untuk membantu pendirian Koperasi di PKL Komplek Manahan, Pasar Nitiharjo, pasar Alpabes dan sebagainya;
- Membantu peningkatan akses pasar dan pangsa pasar dengan menyelenggarakan acara yang melibatkan PKL, seperti; *Car Free Day* di sepanjang Jl. Slamet Riyadi dan Pucang sawit setiap hari Minggu jam 05.00 s.d 09.00. Penyelenggaraan *Sunday Market* di Komplek Stadion Manahan setiap hari Minggu pagi, *Night Market* di Ngarsopuro pada saat tertentu.
- Membantu peningkatan akses permodalan dan sumber-sumber permodalan dengan bekerjasama dengan Bank Solo dan Bank Jateng.
- Membantu peningkatan akses teknologi tepat guna;
- Membantu peningkatan akses kemitraan dengan Supermarket Luwes Grup berkait dengan pembelian bahan baku oleh PKL, dengan Dinas Perdagangan, dan Dinas Perindustrian.
- Membantu peningkatan manajemen dan organisasi kelompok (paguyuban);
- Membantu peningkatan manajemen pengelolaan lokasi bekerjasama dengan Dinas pertamanan dan Satpol PP.

Kota Surakarta memiliki potensi besar sebagai tempat berkembangnya usaha PKL, khususnya bidang kuliner. Apabila dirinci terdapat 4 potensi yang menonjol, antara lain: 1) Potensi Pasar, dimana Kota Surakarta sudah terkenal di

seantero bumi nusantara, sebagai kota wisata, kota budaya, kota batik, pusat perdagangan barang kuno (antik), dan kota destinasi kuliner. Banyak orang yang dulu pernah berkunjung atau berasal dari kota Surakarta dan merantau didaerah lain menjadi promotor bagi berbagai jenis makanan khas kota Surakarta yang terkenal itu, antara lain : Srobi, Tengkleng, Soto, Martabak, Mie Ketoprak, Gudeg Ceker, dan sebagainya. Juga sebagai pusat perdagangan barang-barang pusaka, seperti; keris dan akik. 2) Potensi PKL Kreatif. Semasa krisis ekonomi melanda Indonesia (tahun 1998), masyarakat Kota Surakarta menunjukkan daya kreatifnya dengan berdagang di sektor kakilima, sehingga PKL menjamur di seluruh pojok kota. Khususnya di wilayah Monumen 45 Banjarsari yang terkenal dengan sebutan Monjari. Mereka menjual barang 'klitikan', antara lain; elektronik second, onderdil kendaraan second dan segala macam. Di beberapa wilayah strategis berdiri warung makan yang saat sekarang menjadi warung makan yang kreatif. 3) Potensi industri dan budaya, Kota ini terkenal sebagai kota Budaya. Sehingga banyak usaha-usaha kerajinan yang ditekuni oleh masyarakat kota, antara lain; ukiran, kerajinan rotan, ukiran kaca, lukis kulit hewan, kerajinan keris, dan batik. 4) Potensi Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sedikit banyak perkembangan TI ini mempengaruhi pemasaran bagi usaha-usaha yang memerlukan promosi secara luas.

Bagaimana para PKL menanggapi program pembinaan dan pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Pemkot ? Dari sejumlah PKL (35%), menanggapi bahwa usaha pembinaan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan Pemkot bersifat insidental tak terprogram dengan sasaran terbatas. Baru-baru ini memang dilaksanakan 'Pelatihan Pengolahan Penyajian Makanan bagi PKL' di Kusuma Sahid

Prince Hotel yang diikuti 100 orang PKL kuliner, dengan materi; pemilihan bahan, penyajian dan pelayanan, tetapi menurutnya sering tidak ada tindak lanjut monitoring dan keberlanjutannya. PKL Galabo adalah yang sering mendapat pembinaan dan bimbingan-penyuluhan, selebihnya hanya mendapat bimbingan dan penyuluhan yang berhubungan dengan penegakan peraturan dan ketertiban, seperti misalnya; ketertiban penggunaan lapak, kebersihan, rencana penataan, relokasi dan yang berhubungan dengan pemberian bantuan berupa gerobak, tenda, payung dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya pembinaan belum menyentuh keinginan dan tuntutan para PKL, khususnya yang berhubungan dengan pengembangan usahanya, seperti; permodalan, pengelolaan usaha dan penerbitan Surat Ijin Penempatan (SIP) yang tertunda-tunda.

Para PKL menginginkan Pemkot dapat membantu dalam bernegosiasi dengan Lembaga Keuangan Bank dalam hal jaminan kredit dan bunga. Pemkot sebenarnya telah mewacanakan pemberian Surat Ijin Penempatan (SIP) yang nantinya dapat dijadikan jaminan kredit ke perbankan, tetapi sampai saat ini masih dalam proses. Selain itu telah diadakan pendekatan kepada Bank Solo dan Bank Jateng untuk memberikan kredit dengan bunga rendah kepada PKL. Tetapi karena posisi PKL sendiri yang tidak memiliki jaminan dan kepastian pengembalian kredit, maka perbankan tidak berani melangkah.

Keinginan lain yang menjadi tuntutan PKL adalah kepastian penempatan usaha yang tidak lagi digusur atau dipindah ketempat lain yang kurang potensial, seperti pemindahan PKL yang menjual bukan 'barang pasar' ke pasar

tradisional, pemindahan PKL dari *City Walk* ke tempat Parkir Stadion Manahan yang sepi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pemkot Surakarta telah melakukan pembinaan dan pemberdayaan PKL sesuai tuntutan Perda No. 3 tahun 2008 tentang Pengelolaan PKL, antara lain; 1) Pembimbingan dan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemkot sudah dilaksanakan, tetapi belum maksimal, belum terprogram secara baik dan kurang konsisten, sehingga tidak dapat dirasakan kemanfaatannya oleh para PKL; 2) Belum sepenuhnya dapat membantu kemudahan para PKL untuk memperoleh akses pinjaman modal yang sangat dibutuhkan dari dunia perbankan; 3) Bantuan fasilitas usaha berupa Selter, Gerobak Dagang, Tenda, dan Payung diberikan secara gratis di beberapa lokasi; 4) Akan segera menerbitkan SIP yang sampai saat ini masih dalam proses; 5) Menyelenggarakan beberapa *event* yang melibatkan PKL, antara lain; mendirikan pusat jajan malam permanen 'GALABO' di dekat PGS, *Night Market* di Pasar Ngarsopuro, *Car Free Day* di Jl. Slamet Riyadi dan Pucangsawit setiap hari Minggu jam 05.00-09.00, dan *Sunday Market* di Komplek Stadion Manahan setiap hari Minggu pagi dari jam 05.00-09.00.

Disarankan agar Pemkot segera menyusun model pembinaan yang terprogram dan berkelanjutan, agar dapat mewujudkan usaha PKL yang mandiri dan berdayaguna bagi pelaku dan pemerintah kota.



## DAFTAR PUSTAKA

- Badudu, Yus dan Zain, Sutan Muhammad. 2008. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Friedmann, John. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Minnesota: Wiley.
- Howkins, John.,(2001) *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*. England, New York: Clay Ltd. Amazon.co.uk.
- <http://www.jakarta.go.id/jakv1/produkhukum/search/0/0/all/90/all/75>
- Indrianti, Weny. 2014. *Perbandingan kebijakan dan Upaya pemerintah Dalam Penertiban PKL antara Kabupaten Berau Dengan Tanah Abang Jakarta*. eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 2, Nomor 4, 2014: 3288-3301
- Mimin Rochayati. 2014. *Pelaksanaan Pembinaan PKL oleh Dinas Pariwisata Perindagkop dan UMKM di Pasar Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa ILMU
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya PEMERINTAHAN Vol. 1, No 1 (2014)
- Qasanova, Elmina Dianti dan Khairani, Tuti. 2013. *Evaluasi Penataan dan Pembinaan Pedagang*. *Jurnal Administrasi Pembangunan, Volume 2, Nomor 1, November 2013, hlm. 1-114*.
- Kurniawati, Juni. 2016. *Analisis Kebijakan Strategi Pemberdayaan PKL oleh Pemkot Surakarta*. Seminar Nasional & Call For Paper. Vol 1, No 1 (2016)
- Ramadhan, Adam. 2015. *Model Zonanisasi Penataan PKL di Kota Bandung*. Unnes Law Journal 4 (1) (2015)
- Rapp, C. A., Saleebey, D., & Sullivan, W. P. (2005). *The future of strengths-based social work*. *Advances in Social Work*, 6(1), 79-90.
- Sedarmayanti. 2011. *Tata Kerja dan Produktivitas Kerja: Suatu Tinjauan dari Aspek ekonomi*. Bandung: CV Mandar Maju
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sutrisno, Budi & Suwandi, Joko. 2006. *Pola Penataan Pedagang Kakilima (PKL) di Kota Surakarta: Berdasar Pada Paduan Kepentingan PKL, Warga Masyarakat, dan Pemerintah Kota*. Laporan Penelitian. DP2M- Dikti.

Suwandi, Joko, & Muhibbin, Achmad. 2011. *Penataan PKL Dengan Pendekatan Sambung Rasa Berbasis Budaya Lokal di Kota Surakarta*. Laporan Penelitian LP2M –UMS.

-----, 2012. *Perubahan Orientasi Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasca Krisis Moneter di Kota Surakarta : Koreksi Anggapan Bazaar Economy, Order dan Regulation Theory*. Laporan Penelitian Penelitian Fundamental, DP2M, Dirjen Dikti.

Toffler, Alvin. 1980. *The Third Wave*. New York: William Morrow

UNCTAD. 2010. *Creative Economy: A Feasible Development Option*. Geneva: UNCTAD.

\_\_\_\_\_. 2014. *Blue Print Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Surakarta 2015-2025*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta.